

BAB V

KESIMPULAN

Hubungan Turki China telah dimulai sejak tahun 1971. Namun, kedua negara tidak mempunyai hubungan yang dekat pada tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1980-an hubungan keduanya mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2000, kunjungan kenegaraan antara keduanya mengalami peningkatan. Hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa kunjungan kenegaraan diantara keduanya.

Hingga pada tahun 2009 setelah dimana Presiden Turki, Abdullah Gul, melakukannya kunjungannya ke China. Munculah konflik di China. Tepatnya berada di Provinsi Xinjiang. Konflik tersebut merupakan konflik yang melibatkan dua etnis di China yaitu Uyghur, mempunyai ikatan etnis dengan Turki, dan Han, etnis asli China. Konflik tersebut menyebabkan ratusan korban jiwa baik dari Uyghur maupun Han.

Setelah peristiwa konflik tersebut. Munculah tanggapan dari dunia internasional. Salah satunya ialah Turki, sebagai negara yang mempunyai ikatan etnis dengan salah satu pihak yang berkonflik. Perdana Menteri Erdogan mengecam peristiwa tersebut sebagai tindakan “genosida” dan ditindaklanjuti dengan protes publik Turki di depan Kedutaan China di Ankara dan Istanbul. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menekan pemerintah Turki supaya bereaksi terhadap penindasan etnis Uyghur di Xinjiang.

Respon konflik tersebut membuat hubungan bilateral Turki dan China terancam, apabila hal tersebut terjadi, cenderung menimbulkan masalah-masalah di masa mendatang. Namun faktanya, pada 31 Agustus, Menteri Dalam Negeri Turki, Zafer Caglayan melakukan kunjungan ke China dan bertemu dengan Perdana Menteri China, Wen Jiabao. Dalam pertemuan tersebut kedua wakil negara berdiskusi tentang Konflik di Xinjiang. Dan dilanjutkan dengan kesepakatan kedua negara untuk menguatkan dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dengan berdasar prinsip saling menghormati, *equality* dan kepentingan.

Kedua negara terlihat jelas mempunyai hubungan yang tetap baik dengan adanya kunjungan pada tahun 2010, Wen Jiabao, Perdana Menteri China, mengunjungi Turki dan membicarakan tentang kerjasama ekonomi diantara keduanya. Selain itu pada tahun 2012, Turki mendapat status sebagai *Dialogue Partner* di *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), Organisasi politik, ekonomi dan militer yang dibentuk pada tahun 2001. Dimana anggotanya ialah China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan dan Uzbekistan. Sebagai *Dialogue Partner* artinya Turki berhak untuk mengambil bagian dalam tingkat menteri dan beberapa pertemuan lain dari SCO, namun tidak memiliki hak suara.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan Teori *Rational Choice*. Dimana dalam penentuan kebijakan diperoleh dari hasil penghitungan untung dan rugi. Dimana variabel dalam penghitungan tersebut didasari atas kepentingan nasional yaitu keamanan, ekonomi dan prestise. Berikut hasil kalkulasi apabila Turki mendukung Etnis Uyghur:

- Mengurangi kesempatan Turki untuk menjadi anggota SCO
- Mengancam hubungan bilateral Turki dengan China
- Potensi diungkitnya kasus Kurdi dan Armenia
- Isolasi Ankara
- Mengurangi Akses Turki dengan Uyghur

Sedangkan keuntungan yang didapat ialah:

- Stabilitas politik dalam negeri
- Meningkatkan ikatan etnis dengan diaspora Uyghur

Kalkulasi tersebut menghasilkan jumlah kerugian yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diterima. Sebagai aktor rasional, Pemerintah Turki pastilah tidak bertindak untuk memilih tindakan untuk mendukung Uyghur. Ketidak keberpihakan tersebut dikarenakan secara keamanan, akan menghambat potensi Turki mendapatkan dukungan keamanan dari SCO. Secara ekonomi, menghambat hubungan perdagangan Turki dan China. Secara prestise, memperburuk citra Turki di dunia Internasional. Hal tersebut lah yang menjadi alasan hubungan bilateral Turki dengan China tidak terpengaruh oleh konflik Xinjiang tahun 2009.